



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Alamat: Jalan Laksamana (LC) Baktiseraga, Singaraja, Bali Tlpn/Fax (0362) 3301891
Website: www.bkpsdm.bulelengkab.go.id Email: bkpsdm@bulelengkab.go.id

Singaraja, 18 Maret 2024

Kepada

Yth. Pimpinan Perangkat Daerah
Lingkup Pemerintah Kabupaten
Buleleng
di
Singaraja

SURAT PENGANTAR

Nomor : 800/1367/III/2024

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1.	Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika Nomor : B-38/BLSDM/LT.02.03/02/2024 Perihal : Pemberitahuan Pembukaan Program Beasiswa S2 Luar Negeri Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2024	1 (satu) gabung	Dikirim untuk dapat diinformasikan sebagaimana mestinya



Tembusan disampaikan kepada

1. Yth. Bapak Penjabat Bupati Buleleng sebagai laporan.
2. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng sebagai laporan.
3. Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju

KOMINFO

Jln. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta 10110, Telp./Fax. (021) 3810678, balitbangsdm.kominfo.go.id

Nomor : B-38/BLSDM/LT.02.03/02/2024 Jakarta, 29 Februari 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Pemberitahuan Pembukaan Program Beasiswa S2 Luar Negeri
Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2024

Kepada Yth.
(Daftar Terlampir)
di tempat

Dengan hormat kami sampaikan bahwa dalam rangka pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) unggul khususnya di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Kementerian Komunikasi dan Informatika secara resmi membuka Program Beasiswa S2 Luar Negeri Tahun Anggaran 2024. Program Beasiswa ini ditujukan bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) pusat dan daerah termasuk anggota TNI dan POLRI, serta masyarakat umum dari instansi swasta yang memiliki latar belakang pekerjaan di sektor TIK atau pelaku *startup* lokal.

Pembukaan Pendaftaran Program Beasiswa ini telah dipublikasikan secara resmi pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 melalui situs web beasiswa.kominfo.go.id. Persyaratan pendaftar Program Beasiswa terbagi menjadi Persyaratan Umum yang berlaku untuk seluruh skema beasiswa di semua Universitas dan negara tujuan studi, serta Persyaratan Khusus yang berlaku secara spesifik untuk Universitas dan negara tujuan studi tertentu. Dapat kami informasikan bahwa batas akhir pendaftaran Program Beasiswa S2 Luar Negeri Kementerian Kominfo adalah pada tanggal 30 April 2024, dengan tenggat waktu spesifik yang menyesuaikan dengan kebijakan Universitas tujuan masing-masing.

Informasi selengkapnya terkait persyaratan, prosedur pendaftaran, dan jadwal seleksi penyelenggaraan Program Beasiswa S2 Luar Negeri Kementerian Kominfo dapat diakses melalui situs web beasiswa.kominfo.go.id. Adapun persyaratan, prosedur pendaftaran dan informasi lainnya mengenai Universitas tujuan yang diminati dapat dibaca lebih lanjut pada situs web resmi masing-masing Universitas tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak/Ibu Pimpinan Unit Kerja/Satuan Kerja untuk dapat menyebarluaskan informasi ini kepada pegawai di lingkungan instansi masing-masing, mengintegrasikan program ini dalam perencanaan dan pengembangan SDM, serta mengirimkan calon pendaftar bagi pegawai yang berminat mendaftar untuk memilih program studi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju

KOMINFO

Jln. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta 10110, Telp./Fax. (021) 3810678, balitbangsdm.kominfo.go.id

Apabila Bapak/Ibu Pimpinan Unit Kerja/Satuan Kerja memerlukan keterangan lebih lanjut terkait penyelenggaraan Program Beasiswa ini, dapat menghubungi Tim Administrasi Pengelola Beasiswa S2 Luar Negeri Kementerian Kominfo melalui *email* beasiswa@kominfo.go.id, atau melalui Helpdesk: 0857-6000-8994 (hanya pesan *WhatsApp*), serta media sosial Instagram: @beasiswa.kominfo

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Tembusan:

1. Plt. Sekretaris Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo
2. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Kominfo

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Lampiran : Surat Kepala Badan Pengembangan SDM Kominfo
Nomor : B-38/BLSDM/LT.02.03/02/2024
Tanggal : 29 Februari 2024

PERSYARATAN BEASISWA S2 LUAR NEGERI KEMENTERIAN KOMINFO TA 2024

I. Persyaratan Umum Program Beasiswa S2 Luar Negeri

1. Warga Negara Indonesia (WNI);
2. Masih aktif bekerja dan memiliki masa kerja minimum 2 tahun pada saat melamar (Dibuktikan dengan SK CPNS/PNS/dokumen serupa lainnya bagi PNS/TNI/POLRI dan Surat Keterangan Kerja bagi pelamar umum);
3. Tidak ditujukan bagi pelamar yang berprofesi sebagai dosen;
4. Usia maksimal pada saat mendaftarkan diri:
 - Maksimal 35 Tahun (bagi masyarakat umum)
 - Maksimal 37 Tahun (bagi PNS/TNI/POLRI)
5. Belum Memiliki gelar Magister/ S2 dan tidak sedang mengikuti program pendidikan Magister/S2;
6. Lulusan S1/DIV dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Minimal 3.00 dari skala 4.00;
7. Memiliki sertifikat IELTS 6,5 / TOEFL iBT 80 / TOEFL ITP minimal 550/ Duolingo English Test (DET) minimal 105. Untuk mendaftar Beasiswa Kominfo minimal melampirkan TOEFL ITP / Duolingo English Test. (Pelamar tetap harus memenuhi persyaratan Bahasa Inggris yang ditetapkan Mitra Perguruan Tinggi);
8. Menyusun Rencana Tugas Akhir yang relevan dengan pengembangan transformasi digital nasional (500 - 1000 kata);
9. Menyusun Essay yang berisi Personal statement dan Rencana kontribusi pasca studi, khususnya kontribusi bagi pengembangan transformasi digital nasional (500 - 1000 kata);
10. Menyertakan surat rekomendasi dari pimpinan/dosen pembimbing/atau tokoh lain yang memiliki kredibilitas dan diterbitkan paling lama 1 (satu) tahun pada bulan yang sama dengan pendaftaran (template surat rekomendasi bisa diunduh pada tautan berikut https://komin.fo/template_bk2024);
11. Mendapatkan surat izin pimpinan yang berwenang dari tempat bekerja untuk menjalani pendidikan (template surat izin bisa diunduh pada tautan berikut https://komin.fo/template_bk2024);
12. Pendaftar beasiswa hanya diperkenankan untuk mendaftar pada kelas Reguler atau kelas yang ditetapkan oleh Kementerian Kominfo;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

13. Berkomitmen kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan pendidikan;
14. Diutamakan bagi yang sudah memiliki Letter of Acceptance (LoA) dari Perguruan Tinggi mitra Kominfo;
15. Bagi pendaftar lulusan perguruan tinggi luar negeri pada jenjang pendidikan sebelumnya, melampirkan:
 - Hasil penyetaraan ijazah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui laman <https://piln.kemdikbud.go.id/> atau Kementerian Agama melalui laman <https://diktis.kemenag.go.id/penyetaraanijazah/>
 - Hasil konversi IPK dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui laman <https://piln.kemdikbud.go.id/> atau Kementerian Agama melalui laman <https://diktis.kemenag.go.id/penyetaraanijazah/>
 - Tangkapan layar ajuan penyetaraan ijazah dan/atau konversi IPK pada laman Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kementerian Agama mengenai penyetaraan ijazah dan/atau konversi IPK bagi pendaftar yang penyetaraan ijazah dan/atau konversi IPK-nya belum terbit.

Persyaratan Tambahan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS/TNI/POLRI)

1. Tugas dan fungsinya dalam pekerjaan berkaitan dengan salah satu program studi yang akan ditempuh yakni pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah, tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)/Keamanan Informasi, penyusunan strategi dan kebijakan bidang digital serta peningkatan daya saing nasional dalam sektor ekonomi digital.
2. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 2 (dua) tahun terakhir;
3. Memenuhi persyaratan penetapan tugas belajar sebagaimana dimaksud SE MENPAN RB Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan

Mitra Perguruan Tinggi Badan Pengembangan SDM (BPSDM) Kominfo dalam penyelenggaraan Program Beasiswa Luar Negeri Kominfo 2024 adalah sebagai berikut:

1. **University of Twente** - Program Studi Communication Science, Business Information Technology, Computer Science, Interaction Technology, Philosophy of Science, Technology and Society;
2. **The University of Electro-Communications (UEC)** - Program Studi ICT-related fields;
3. **Tsinghua University** - Program Studi Public Administration in International Development;
4. **International Institute of Information Technology Bangalore (IIIT Bangalore)** - Program Studi Digital Society, dan Computer Science and Engineering;
5. **Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM)** - Program Studi: Artificial Intelligence for Connected Industries, Telecommunications & Networks, Computer Networks and IoT Systems, E-Business and Digital Marketing;
6. **University of Strathclyde** - Program Studi: Digital Journalism, Media & Communication, Artificial Intelligence & Applications, 5G Advanced Communications, MSc in Advanced Computer Science with Artificial Intelligence;
7. **EURECOM** - Program Studi: Digital Security, EIT Digital Cyber Security (CES), Data Science, Internet of Things (IoT), Intelligent Communication Systems, Autonomous Systems (AUS);
8. **IMT Atlantique** - Program Studi: Information Technology / Track Data Science, Information Technology / Track Architecture and Engineering for the Internet of Things, Information Technology / Track Communication System and Network Engineering.



SURAT REKOMENDASI PENDAFTARAN BEASISWA KOMINFO

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Instansi :
Alamat Lembaga :
No. Telp/Handphone :
E-mail :

Memberi rekomendasi kepada :
Nama :
Jabatan :
Instansi :
Alamat :

Deskripsi Rekomendasi:

Demikian surat rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....
(Perekomendasi)

(_____)

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Surat Izin Atasan untuk Pelamar PNS/TNI/POLRI

KOP INSTANSI

SURAT IZIN ATASAN

No.

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

Memberikan izin untuk mengikuti seleksi **Program Beasiswa S2 Dalam/Luar Negeri*** Kementerian Kominfo bagi salah satu pegawai kami berikut:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

Pegawai dimaksud benar merupakan pegawai **(Nama instansi/satuan kerja)*** yang memiliki tugas yang berkaitan dengan **(dilengkapi dengan tugas dan fungsi bidang pekerjaan saat ini)*** pada instansi kami dan telah Memenuhi persyaratan penetapan tugas belajar sebagaimana dimaksud SE MENPAN RB Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan. Keikutsertaan pegawai dimaksud pada Program Beasiswa S2 Dalam Negeri Bidang Komunikasi dan Informatika telah sesuai dengan peta pengembangan kompetensi pegawai pada instansi kami dan nantinya akan ditempatkan/ditugaskan sesuai dengan ilmu dan kompetensi yang dimiliki sesuai dengan program studi yang akan ditempuh.

Demikian Surat Izin ini dibuat untuk memenuhi kelengkapan berkas yang dibutuhkan untuk proses seleksi pada Program Beasiswa S2 **Dalam/Luar Negeri*** Bidang Komunikasi dan Informatika Kementerian Kominfo tahun 2024.

Kota Domisili, tanggal, Bulan, Tahun
Ttd dan cap instansi

(Nama Pejabat Penandatangan)

Keterangan:

***Disesuaikan dengan kondisi pelamar**

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Surat Izin Atasan Pelamar Umum

KOP INSTANSI

SURAT IZIN ATASAN

Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Nama Instansi :
Alamat Instansi :
Telepon :
E-mail :

Dengan ini memberikan izin kepada pegawai berikut untuk mengikuti proses seleksi Program Beasiswa **S2 Dalam/Luar Negeri*** Kementerian Kominfo dan untuk menempuh studi ***apabila dinyatakan lulus sebagai penerima beasiswa*** Kementerian Kominfo:

Nama :
NIK :
Jabatan :

Demikian surat izin ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Domisili, tanggal, Bulan, Tahun
Ttd dan cap instansi

(Nama Pejabat Penandatanganan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Lampiran : Surat Kepala Badan Pengembangan SDM Kominfo
Nomor : B-38/BLSDM/LT.02.03/02/2024
Tanggal : 29 Februari 2024

Daftar Lampiran

I. KEMENTERIAN DAN LEMBAGA

- 1. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia**
 - a. Sekretaris Jenderal
 - b. Kepala Badan Pengembangan SDM
- 2. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia**
 - a. Sekretaris Jenderal
 - b. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
- 3. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia**
 - a. Sekretaris Jenderal
 - b. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan
- 4. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia**
 - a. Sekretariat Jenderal
 - b. Kepala Badan Pengembangan SDM Hukum dan HAM
- 5. Kementerian Keuangan Republik Indonesia**
 - a. Sekretariat Jenderal
 - b. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
- 6. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia**
 - a. Sekretaris Jenderal
 - b. Kepala Badan Pengembangan SDM dan ESDM
- 7. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia**
 - a. Sekretaris Jenderal
 - b. Kepala Badan Pengembangan SDM Industri
- 8. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia**
 - a. Sekretaris Jenderal
 - b. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan
- 9. Kementerian Sosial Republik Indonesia**
 - a. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial
 - b. Kepala Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial
- 10. Kementerian Pertanian Republik Indonesia**
 - a. Sekretaris Jenderal
 - b. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
- 11. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia**
 - a. Sekretaris Jenderal
 - b. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

12. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

- a. Sekretaris Jenderal
- b. Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan

13. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

- a. Sekretaris Jenderal
- b. Kepala Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan

14. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

- a. Sekretaris Jenderal
- b. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan

15. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia

- a. Sekretaris Jenderal
- b. Kepala Badan Pengembangan SDM

16. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

- a. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Indonesia
- b. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan

17. Kementerian Agama Republik Indonesia

- a. Sekretaris Jenderal
- b. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan

18. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia

- a. Sekretaris Jenderal
- b. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan

19. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

- a. Sekretaris Jenderal
- b. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi

20. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia

- a. Sekretaris Kementerian
- b. Staf Ahli Bidang SDM dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

21. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia

- a. Sekretaris Kementerian
- b. Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

22. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia

- a. Sekretaris Kementerian

23. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia

- a. Sekretaris Kementerian
- b. Kepala Deputi Bidang Koordinasi SDM

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

- 24. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia**
 - a. Sekretaris Kementerian
 - b. Deputi Bidang Administrasi Aparatur
- 25. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia**
 - a. Sekretaris Kementerian
 - b. Deputi Bidang Pengembangan SDM
- 26. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia**
 - a. Sekretaris Kementerian
- 27. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia**
 - a. Sekretaris Kementerian
 - b. Deputi Bidang SDM Aparatur
- 28. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia**
 - a. Sekretaris Utama
 - b. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan
- 29. Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia**
 - a. Sekretaris Kementerian
 - b. Deputi Manajemen SDM Eksekutif
- 30. Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia**
 - a. Sekretaris Kementerian
- 31. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia**
 - a. Sekretaris Kementerian Pariwisata Indonesia
 - b. Deputi Pengembangan SDM Aparatur
- 32. Arsip Nasional Republik Indonesia**
 - a. Sekretaris Utama
- 33. Badan Kepegawaian Negara**
 - a. Sekretaris Umum
- 34. Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)**
 - a. Sekretaris Utama Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
 - b. Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan
- 35. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia**
 - a. Sekretaris Jenderal
 - b. Direktur Utama Perencanaan, Evaluasi, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara
- 36. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan**
 - a. Sekretaris Utama
 - b. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

- 37. Lembaga Administrasi Negara**
 - a. Sekretaris Utama
 - b. Deputi Diklat Aparatur
- 38. Markas Besar Kepolisian Negara RI**
 - a. Sekretaris Utama Mabes Polri
 - b. Deputi SDM
- 39. Markas Besar Tentara Negara Indonesia (TNI)**
 - a. Sekretaris Komandan TNI
- 40. Badan Koordinasi Penanaman Modal**
 - a. Sekretaris Utama
- 41. Badan Informasi Geospasial**
 - a. Sekretaris Utama
- 42. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika**
 - a. Sekretaris Utama
- 43. Badan Pembinaan Hukum Nasional**
 - a. Sekretaris Utama
- 44. Badan Pengawasan Obat dan Makanan**
 - a. Sekretaris Utama
- 45. Badan Pengawas Tenaga Nuklir**
 - a. Sekretaris Utama
- 46. Badan Standarisasi Nasional**
 - a. Sekretaris Utama
- 47. Badan Urusan Logistik**
 - a. Sekretaris Utama
 - b. Direktur SDM dan Umum
- 48. Badan Pusat Statistik**
 - a. Sekretaris Utama
- 49. Badan Narkotika Nasional**
 - a. Sekretaris Utama
- 50. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme**
 - a. Sekretaris Utama
- 51. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia**
 - a. Sekretaris Utama
- 52. Badan Intelijen Negara**
 - a. Sekretaris Utama
- 53. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Badan SAR Nasional)**
 - a. Sekretaris Utama

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

54. Badan Siber dan Sandi Negara

a. Sekretaris Utama

55. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan

a. Sekretaris Utama

56. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

a. Sekretaris Utama

57. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

a. Sekretaris Utama

58. Komisi Pemberantasan Korupsi

a. Sekretaris Jenderal

59. Komisi Penyiaran Indonesia

a. Sekretaris KPI Pusat

60. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

a. Sekretaris Jenderal

61. Badan Nasional Penanggulangan Bencana

a. Sekretaris Utama

62. Badan Keamanan Laut

a. Sekretaris Utama

II. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

NANGGROE ACEH DARUSSALAM

1. Sekretaris Daerah Provinsi Aceh
2. Kepala BPSDM Provinsi Aceh
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara
8. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur
9. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara
10. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat
11. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Selatan
12. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya
13. Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues

14. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang
15. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireun
16. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil
17. Sekretaris Daerah Kabupaten Simeuleu
18. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Jaya
19. Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya
20. Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah
21. Sekretaris Daerah Kota Sabang
22. Sekretaris Daerah Kota Langsa
23. Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh
24. Sekretaris Daerah Kota Subulussalam
25. Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe

SUMATERA UTARA

26. Sekretaris Provinsi Sumatera Utara
27. Kepala BPSDM Provinsi Sumatera Utara
28. Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang
29. Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat
30. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
31. Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi
32. Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhan Batu
33. Sekretaris Daerah Kabupaten Karo
34. Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun
35. Sekretaris Daerah Kabupaten Nias
36. Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir
37. Sekretaris Daerah Kabupaten Pak Pak Barat
38. Sekretaris Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan
39. Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
40. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
41. Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan
42. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanulu Tengah
43. Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal
44. Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan
45. Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir
46. Sekretaris Daerah Kota Binjai

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

47. Sekretaris Daerah Kota Sibolga
48. Sekretaris Daerah Kota Medan
49. Sekretaris Daerah Kota Pematang Siantar
50. Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi
51. Sekretaris Daerah Kota Padang Sidempuan
52. Sekretaris Daerah Kota Tanjung Balai

SUMATERA BARAT

53. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat
54. Kepala BPSDM Provinsi Sumatera Barat
55. Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
56. Sekretaris Daerah Kabupaten Solok
57. Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman
58. Sekretaris Daerah Kabupaten Kep. Mentawai
59. Sekretaris Daerah Kabupaten Agam
60. Sekretaris Daerah Kabupaten Sawah Lunto Sijunjung
61. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar
62. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
63. Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman
64. Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat
65. Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmas Raya
66. Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan
67. Sekretaris Daerah Kota Padang
68. Sekretaris Daerah Kota Sawah Lunto
69. Sekretaris Daerah Kota Payahkumbuh
70. Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang
71. Sekretaris Daerah Kota Bukit Tinggi
72. Sekretaris Daerah Kota Solok
73. Sekretaris Daerah Kota Pariaman

RIAU

74. Sekretaris Daerah Provinsi Riau
75. Kepala BPSDM Provinsi Riau
76. Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar
77. Sekretaris Daerah Kabupaten Kabupaten Bengkalis

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

78. Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
79. Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
80. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
81. Sekretaris Daerah Kabupaten Siak
82. Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu
83. Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir
84. Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan
85. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
86. Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru
87. Sekretaris Daerah Kota Dumai

SUMATERA SELATAN

88. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
89. Kepala BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan
90. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
91. Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
92. Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
93. Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim
94. Sekretaris Daerah Kabupaten Lahat
95. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas
96. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin
97. Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir
98. Sekretaris Daerah Kota Ogan Komering Ulu Selatan
99. Sekretaris Daerah Kota Ogan Komering Ulu Timur
100. Sekretaris Daerah Kota Palembang
101. Sekretaris Daerah Kota Prabumulih
102. Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
103. Sekretaris Daerah Kota Lubuk Linggau

KEPULAUAN RIAU

104. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau
105. Kepala BPSDM Provinsi Kepulauan Riau
106. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan
107. Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun
108. Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

109. Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga
110. Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang
111. Sekretaris Daerah Kota Batam

JAMBI

112. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi
113. Kepala BPSDM Provinsi Jambi
114. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci
115. Sekretaris Daerah Kabupaten Batanghari
116. Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo
117. Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun
118. Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi
119. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
120. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
121. Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin
122. Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo
123. Sekretaris Daerah Kota Jambi

BENKULU

124. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu
125. Kepala BPSDM Provinsi Bengkulu
126. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
127. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
128. Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong
129. Sekretaris Daerah Kabupaten Muko – Muko
130. Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma
131. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang
132. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong
133. Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur
134. Sekretaris Daerah Kota Bengkulu

BANGKA BELITUNG

135. Sekretaris Daerah Provinsi Bangka Belitung
136. Kepala BKPSDMD Provinsi Bangka Belitung
137. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

138. Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung
139. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan
140. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah
141. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat
142. Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur
143. Sekretaris Daerah Kota Pangkal Pinang

LAMPUNG

144. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
145. Kepala BPSDM Provinsi Lampung
146. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah
147. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
148. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
149. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur
150. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara
151. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus
152. Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang
153. Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan
154. Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu
155. Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung
156. Sekretaris Daerah Kota Metro

BANTEN

157. Sekretaris Daerah Provinsi Banten
158. Kepala BPSDMD Provinsi Banten
159. Sekretaris Daerah Kabupaten Serang
160. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak
161. Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang
162. Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang
163. Sekretaris Daerah Kota Tangerang
164. Sekretaris Daerah Kota Cilegon
165. Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan
166. Sekretaris Daerah Kota Serang

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

DKI JAKARTA

167. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
168. Kepala BPSDM Provinsi
169. Sekretaris Daerah Kota Jakarta Pusat
170. Sekretaris Daerah Kota Jakarta Utara
171. Sekretaris Daerah Kota Jakarta Timur
172. Sekretaris Daerah Kota Jakarta Selatan
173. Sekretaris Daerah Kota Jakarta Barat
174. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Seribu

JAWA BARAT

175. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat
176. Kepala BPSDM Provinsi Jawa Barat
177. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor
178. Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur
179. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi
180. Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu
181. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
182. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
183. Sekretaris Daerah Kabupaten Subang
184. Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang
185. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang
186. Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis
187. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan
188. Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka
189. Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi
190. Sekretaris Daerah Kabupaten Garut
191. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung
192. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat
193. Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya
194. Sekretaris Daerah Kota Cirebon
195. Sekretaris Daerah Kota Sukabumi
196. Sekretaris Daerah Kota Bogor
197. Sekretaris Daerah Kota Bekasi
198. Sekretaris Daerah Kota Cimahi

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

199. Sekretaris Daerah Kota Bandung
200. Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya
201. Sekretaris Daerah Kota Banjar
202. Sekretaris Daerah Kota Depok

JAWA TENGAH

203. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
204. Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
205. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang
206. Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal
207. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak
208. Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan
209. Sekretaris Daerah Kabupaten Pati
210. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus
211. Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara
212. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
213. Sekretaris Daerah Kabupaten Blora
214. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan
215. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang
216. Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang
217. Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal
218. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes
219. Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap
220. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga
221. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara
222. Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang
223. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung
224. Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo
225. Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo
226. Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen
227. Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten
228. Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali
229. Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen
230. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
231. Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

- 232. Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar
- 233. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas
- 234. Sekretaris Daerah Kota Semarang
- 235. Sekretaris Daerah Kota Salatiga
- 236. Sekretaris Daerah Kota Pekalongan
- 237. Sekretaris Daerah Kota Tegal
- 238. Sekretaris Daerah Kota Magelang
- 239. Sekretaris Daerah Kota Surakarta

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- 240. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- 241. Kepala Badan Diklat Daerah Istimewa Yogyakarta
- 242. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
- 243. Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo
- 244. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Kidul
- 245. Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman
- 246. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta

JAWA TIMUR

- 247. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
- 248. Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur
- 249. Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun
- 250. Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo
- 251. Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan
- 252. Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo
- 253. Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik
- 254. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
- 255. Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto
- 256. Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan
- 257. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan
- 258. Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang
- 259. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep
- 260. Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
- 261. Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo
- 262. Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

263. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
264. Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek
265. Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
266. Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung
267. Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
268. Sekretaris Daerah Kabupaten Malang
269. Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang
270. Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro
271. Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri
272. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
273. Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
274. Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
275. Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban
276. Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang
277. Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar
278. Sekretaris Daerah Kota Madiun
279. Sekretaris Daerah Kota Kediri
280. Sekretaris Daerah Kota Blitar
281. Sekretaris Daerah Kota Surabaya
282. Sekretaris Daerah Kota Mojokerto
283. Sekretaris Daerah Kota Pasuruan
284. Sekretaris Daerah Kota Batu
285. Sekretaris Daerah Kota Malang
286. Sekretaris Daerah Kota Probolinggo

BALI

287. Sekretaris Daerah Provinsi Bali
288. Kepala BKPSDM Provinsi Bali
289. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan
290. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana
291. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
292. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar
293. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli
294. Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung
295. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

- 296. Sekretaris Daerah Kabupaten Badung
- 297. Sekretaris Daerah Kota Denpasar

NUSA TENGGARA BARAT

- 298. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
- 299. Kepala BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat
- 300. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur
- 301. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat
- 302. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah
- 303. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa
- 304. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat
- 305. Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu
- 306. Sekretaris Daerah Kabupaten Bima
- 307. Sekretaris Daerah Kota Mataram
- 308. Sekretaris Daerah Kota Bima

NUSA TENGGARA TIMUR

- 309. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
- 310. Kepala BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur
- 311. Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka
- 312. Sekretaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
- 313. Sekretaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara
- 314. Sekretaris Daerah Kabupaten Belu
- 315. Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang
- 316. Sekretaris Daerah Kabupaten Ende
- 317. Sekretaris Daerah Kabupaten Alor
- 318. Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai
- 319. Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat
- 320. Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur
- 321. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur
- 322. Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao
- 323. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat
- 324. Sekretaris Daerah Kota Kupang

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

MALUKU

325. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku
326. Kepala BPSDM Provinsi Maluku
327. Sekretaris Daerah Kabupaten Buru
328. Sekretaris Daerah Kabupaten Buru Selatan
329. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Aru
330. Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya
331. Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah
332. Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara
333. Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
334. Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat
335. Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur
336. Sekretaris Daerah Kota Ambon
337. Sekretaris Daerah Kota Tual

MALUKU UTARA

338. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara
339. Kepala BPSDM Provinsi Maluku Utara
340. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat
341. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah
342. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Utara
343. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
344. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sula
345. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur
346. Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai
347. Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Taliabu
348. Sekretaris Daerah Kota Ternate
349. Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan

KALIMANTAN BARAT

350. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat
351. Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Barat
352. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang
353. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
354. Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Lor

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

355. Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang
356. Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya
357. Sekretaris Daerah Kabupaten Landak
358. Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi
359. Sekretaris Daerah Kabupaten Pontianak
360. Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas
361. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau
362. Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau
363. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang
364. Sekretaris Daerah Kota Pontianak
365. Sekretaris Daerah Kota Singkawang

KALIMANTAN TENGAH

366. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
367. Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah
368. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan
369. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur
370. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara
371. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas
372. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas
373. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan
374. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotowaringin Barat
375. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotowaringin Timur
376. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau
377. Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya
378. Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau
379. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara
380. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan
381. Sekretaris Daerah Kota Palangkaraya

KALIMANTAN SELATAN

382. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
383. Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan
384. Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan
385. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

386. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala
387. Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
388. Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
389. Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
390. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru
391. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong
392. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
393. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut
394. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin
395. Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru
396. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin

KALIMANTAN TIMUR

397. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
398. Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Timur
399. Sekretaris Daerah Kabupaten Berau
400. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat
401. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
402. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur
403. Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu
404. Sekretaris Daerah Kabupaten Kabupaten Paser
405. Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
406. Sekretaris Daerah Kota Balikpapan
407. Sekretaris Daerah Kota Bontang
408. Sekretaris Daerah Kota Samarinda

KALIMANTAN UTARA

409. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara
410. Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
411. Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan
412. Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau
413. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan
414. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung
415. Sekretaris Daerah Kota Tarakan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

SULAWESI SELATAN

416. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
417. Kepala BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan
418. Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar
419. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone
420. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng
421. Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai
422. Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto
423. Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo
424. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
425. Sekretaris Daerah Kabupaten Enrekang
426. Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang
427. Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene Kepulauan
428. Sekretaris Daerah Kabupaten Selayar
429. Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa
430. Sekretaris Daerah Kabupaten Maros
431. Sekretaris Daerah Kabupaten Barru
432. Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng
433. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu
434. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara
435. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur
436. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja
437. Sekretaris Daerah Kabupaten Bulukumba
438. Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara
439. Sekretaris Daerah Kota Makassar
440. Sekretaris Daerah Kota Parepare
441. Sekretaris Daerah Kota Palopo

SULAWESI UTARA

442. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara
443. Kepala BPSDMD Provinsi Sulawesi Utara
444. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa
445. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara
446. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Selatan
447. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

448. Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
449. Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
450. Sekretaris Daerah Kabupaten Sangihe
451. Sekretaris Daerah Kota Manado
452. Sekretaris Daerah Kota Tomohon
453. Sekretaris Daerah Kota Bitung
454. Sekretaris Daerah Kabupaten Siao Tagulandang Biaro

SULAWESI TENGAH

455. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
456. Kepala BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah
457. Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala
458. Sekretaris Daerah Kabupaten Poso
459. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai
460. Sekretaris Daerah Kabupaten Toli Toli
461. Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong
462. Sekretaris Daerah Kabupaten Buol
463. Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali
464. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
465. Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una Una
466. Sekretaris Daerah Kota Palu

SULAWESI TENGGARA

467. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
468. Kepala BPSDM Provinsi Sulawesi Tenggara
469. Sekretaris Daerah Kabupaten Muna
470. Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe
471. Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan
472. Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka
473. Sekretaris Daerah Kabupaten Buton
474. Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi
475. Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara
476. Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana
477. Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara
478. Sekretaris Daerah Kota Kendari

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

479. Sekretaris Daerah Kota Baubau

SULAWESI BARAT

480. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat

481. Kepala BPSDM Provinsi Sulawesi Barat

482. Sekretaris Daerah Kabupaten Majene

483. Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju

484. Sekretaris Daerah Kabupaten Mamasa

485. Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar

486. Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Utara

GORONTALO

487. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo

488. Kepala BPSDM Provinsi Gorontalo

489. Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo

490. Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo

491. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango

492. Sekretaris Daerah Kabupaten Pahuwato

493. Sekretaris Daerah Kota Gorontalo

PAPUA

494. Sekretaris Daerah Provinsi Papua

495. Kepala BPSDM Provinsi Papua

496. Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura

497. Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke

498. Sekretaris Daerah Kabupaten Jayawijaya

499. Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire

500. Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak Jaya

501. Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika

502. Sekretaris Daerah Kabupaten Waropen

503. Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi

504. Sekretaris Daerah Kabupaten Keerom

505. Sekretaris Daerah Kabupaten Boven Digoel

506. Sekretaris Daerah Kabupaten Mappi

507. Sekretaris Daerah Kabupaten Asmat

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

- *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

- 508. Sekretaris Daerah Kabupaten Supiori
- 509. Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor
- 510. Sekretaris Daerah Kabupaten Yapen Waropen
- 511. Sekretaris Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang
- 512. Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo
- 513. Sekretaris Daerah Kabupaten Tolikara
- 514. Sekretaris Daerah Kota Jayapura

PAPUA BARAT

- 515. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat
- 516. Kepala BPSDMD Provinsi Papua Barat
- 517. Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong Selatan
- 518. Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari
- 519. Sekretaris Daerah Kabupaten Kaimana
- 520. Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Wondama
- 521. Sekretaris Daerah Kabupaten Fak Fak
- 522. Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong
- 523. Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni
- 524. Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat
- 525. Sekretaris Daerah Kota Sorong

PAPUA SELATAN

- 526. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan
- 527. Kepala BKPSDM Provinsi Papua Selatan
- 528. Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke
- 529. Sekretaris Daerah Kabupaten Mappi
- 530. Sekretaris Daerah Kabupaten Asmat
- 531. Sekretaris Daerah Kabupaten Boven Digoel

PAPUA TENGAH

- 532. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah
- 533. Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire
- 534. Sekretaris Daerah Kabupaten Paniai
- 535. Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika
- 536. Sekretaris Daerah Kabupaten Dogiyai

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

- 537. Sekretaris Daerah Kabupaten Deyiai
- 538. Sekretaris Daerah Kabupaten Intan Jaya
- 539. Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak
- 540. Sekretaris Daerah Kabupaten Kabupaten Puncak Jaya

PAPUA PEGUNUNGAN

- 541. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan
- 542. Kepala BKPSDM Provinsi Papua Pegunungan
- 543. Sekretaris Daerah Kabupaten Jayawijaya
- 544. Sekretaris Daerah Kabupaten Lanny Jaya
- 545. Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah
- 546. Sekretaris Daerah Kabupaten Nduga
- 547. Sekretaris Daerah Kabupaten Tolikara
- 548. Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo
- 549. Sekretaris Daerah Kabupaten Yalimo
- 550. Sekretaris Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang PAPUA BARAT DAYA
- 551. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya
- 552. Kepala BKPSDM Provinsi Papua Barat Daya
- 553. Sekretaris Daerah Kota Sorong
- 554. Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong
- 555. Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong Selatan
- 556. Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat
- 557. Sekretaris Daerah Kabupaten Tambrauw
- 558. Sekretaris Daerah Kabupaten Maybrat

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**